



*Rudy C Tarumingkeng: Ekonomi Pangan: Stabilitas Harga dan
Ketahanan Sosial*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

29 March 2026

EKONOMI PANGAN: STABILITAS HARGA DAN KETAHANAN SOSIAL

Abstrak

Ekonomi pangan merupakan bidang yang berada di persimpangan antara produksi, distribusi, konsumsi, harga, gizi, dan kebijakan publik. Dalam masyarakat modern, pangan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai komoditas pasar, melainkan sebagai fondasi kesejahteraan, stabilitas sosial, kesehatan publik, dan legitimasi negara. Karena itu, stabilitas harga pangan memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar indikator inflasi. Harga pangan yang stabil menentukan daya beli rumah tangga, keberlanjutan usaha tani, efektivitas perlindungan sosial, serta kemampuan negara menjaga ketahanan sosial pada saat terjadi guncangan ekonomi, iklim, atau geopolitik. Makalah ini bertujuan membahas hubungan antara ekonomi pangan, stabilitas harga, dan ketahanan sosial, dengan menempatkan Indonesia dalam konteks dinamika global dan nasional terkini. Secara konseptual, pembahasan bertumpu pada definisi ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kerangka food systems dari OECD dan World Bank, analisis FAO tentang food price inflation, serta pandangan WHO mengenai diet sehat dan lingkungan pangan. Secara empiris, laporan

FAO tahun 2025 menunjukkan bahwa inflasi pangan yang tinggi telah menekan daya beli dan memperburuk kerawanan pangan dan malnutrisi, sementara Bank Indonesia dan BPS memperlihatkan bahwa Indonesia sepanjang 2025 berhasil menjaga inflasi umum dalam kisaran sasaran, meskipun tekanan pangan bergejolak tetap nyata. Pada saat yang sama, data BPS menunjukkan bahwa kemiskinan nasional memang menurun, tetapi struktur garis kemiskinan tetap memperlihatkan sentralitas pengeluaran makanan dalam kesejahteraan rumah tangga. Makalah ini berargumen bahwa stabilitas harga pangan harus dipahami sebagai hasil interaksi antara produktivitas domestik, distribusi, logistik, cadangan pangan, ekspektasi pasar, kebijakan moneter-fiskal, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, ketahanan sosial tidak dapat dijaga hanya dengan produksi yang tinggi atau inflasi agregat yang rendah, melainkan membutuhkan sistem ekonomi pangan yang mampu menjamin akses pangan yang terjangkau, melindungi kelompok rentan, sekaligus menjaga insentif produsen. Stabilitas harga pangan, dalam perspektif ini, adalah instrumen pembangunan manusia dan kohesi sosial, bukan sekadar target statistik makroekonomi. ([Peraturan BPK](#))

Kata kunci: ekonomi pangan, stabilitas harga, inflasi pangan, ketahanan sosial, perlindungan sosial, Indonesia

Pendahuluan

Di antara seluruh komoditas yang beredar dalam perekonomian, pangan menempati posisi yang sangat khusus. Kenaikan harga kendaraan, elektronik, atau jasa rekreasi memang memengaruhi pola konsumsi masyarakat, tetapi kenaikan harga pangan menyentuh dimensi yang jauh lebih mendasar, yakni keberlangsungan hidup sehari-hari. Pangan adalah kebutuhan biologis yang tidak dapat ditunda lama, sehingga perubahan harganya langsung memengaruhi konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Itulah sebabnya ekonomi pangan bukan sekadar cabang ekonomi sektoral, melainkan bagian dari arsitektur stabilitas sosial. Dalam kerangka hukum Indonesia, ketahanan pangan

didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau untuk hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Rumusan ini menunjukkan bahwa sejak awal, pangan dipahami sebagai isu yang menyatukan ekonomi, kesehatan, distribusi, dan keadilan sosial. ([Peraturan BPK](#))

Dalam konteks global, urgensi persoalan ini semakin nyata. Laporan *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025* menegaskan bahwa inflasi pangan yang tinggi telah menggerus daya beli rumah tangga dan memperburuk akses terhadap diet sehat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Laporan yang sama juga menyebut bahwa sekitar 673 juta orang di dunia masih menghadapi kelaparan pada 2024, sementara inflasi pangan sejak 2020 secara konsisten melampaui inflasi umum di banyak negara. Artinya, tekanan harga pangan bukan fenomena sesaat, tetapi gejala struktural yang memengaruhi lintasan pemulihan kesejahteraan global pascapandemi. Dalam bahasa ekonomi politik, pangan kembali menjadi penentu apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat atau hanya tercermin pada indikator agregat. ([FAOHome](#))

Indonesia menghadapi persoalan yang sama dengan konfigurasi yang khas. Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk besar dan struktur produksi pangan yang tersebar, Indonesia harus menjaga keseimbangan antara ketersediaan, keterjangkauan, distribusi, dan insentif bagi produsen. Bank Indonesia mencatat bahwa target inflasi untuk 2025, 2026, dan 2027 ditetapkan pada 2,5 persen dengan koridor ± 1 persen, dan inflasi 2025 berhasil ditutup pada 2,92 persen, masih dalam kisaran sasaran. Namun capaian itu tidak berarti tekanan pangan hilang sama sekali, karena Bank Indonesia juga mencatat inflasi *volatile food* tahun 2025 berada di 6,21 persen secara tahunan. Dengan demikian, di balik inflasi umum yang terkendali, harga pangan tetap menjadi sumber kerentanan yang harus dikelola secara spesifik. ([Bank Indonesia](#))

Makalah ini membahas ekonomi pangan dari sudut pandang stabilitas harga dan ketahanan sosial. Fokusnya bukan hanya pada bagaimana harga dibentuk, tetapi juga pada bagaimana harga memengaruhi daya beli, kemiskinan, kesejahteraan petani, dan efektivitas perlindungan sosial. Dengan memakai kerangka resmi dari FAO, OECD, World Bank, BPS, Bank Indonesia, dan Badan Pangan Nasional, makalah ini berargumen bahwa stabilitas harga pangan harus dipandang sebagai tujuan pembangunan yang bersifat multidimensi. Harga yang stabil bukan hanya baik bagi pasar, tetapi juga bagi kohesi sosial, kesehatan publik, dan legitimasi negara. Sebaliknya, gejolak harga pangan yang tidak terkendali berpotensi menurunkan kualitas hidup, memperbesar kerentanan, dan melemahkan ketahanan sosial masyarakat. ([Badan Pangan Nasional](#))

1. Landasan Konseptual Ekonomi Pangan

Ekonomi pangan dapat dipahami sebagai studi mengenai bagaimana pangan diproduksi, didistribusikan, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diatur di dalam sistem ekonomi. Berbeda dari komoditas biasa, pangan memiliki tiga ciri khusus. Pertama, permintaannya relatif inelastis pada tingkat dasar karena terkait kebutuhan hidup. Kedua, produksinya sangat dipengaruhi faktor alam, musim, iklim, dan risiko biologis. Ketiga, dampak sosial dari gejolak harganya jauh lebih besar daripada banyak komoditas lain. Karena itu, mekanisme pasar dalam sektor pangan sering kali membutuhkan koreksi, stabilisasi, dan dukungan kelembagaan dari negara. OECD menekankan bahwa *food systems* menghadapi tantangan ganda bahkan tiga sekaligus: menjamin ketahanan pangan dan gizi, menopang penghidupan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam praktiknya, kebijakan yang berhasil pada satu dimensi dapat menimbulkan biaya pada dimensi lain, sehingga ekonomi pangan selalu berkaitan dengan pengelolaan *trade-off*. ([FAOHome](#))

Konsep sistem pangan membantu memperluas cara pandang terhadap pangan. Pangan tidak berhenti pada sawah atau pasar induk, melainkan mencakup seluruh rantai dari produksi, pascapanen, penyimpanan, logistik,

pengolahan, perdagangan, konsumsi, hingga limbah. World Bank melalui *FoodSystems 2030* menempatkan sistem pangan sebagai jantung pembangunan yang menghubungkan diet bergizi, pendapatan produsen, daya saing, dan resiliensi. Dari perspektif ini, harga pangan adalah hasil dari keseluruhan sistem, bukan hanya hasil panen. Harga dapat naik bukan hanya karena produksi turun, tetapi juga karena distribusi tersendat, ekspektasi pasar memburuk, biaya energi meningkat, atau intervensi kebijakan terlambat. Karena itu, ekonomi pangan yang sehat menuntut koordinasi antara kebijakan produksi, logistik, perdagangan, informasi pasar, dan perlindungan sosial. ([The World Bank](#))

Dalam ekonomi pangan, stabilitas harga memiliki arti yang lebih kompleks daripada "harga murah". Harga yang terlalu tinggi jelas memberatkan konsumen, tetapi harga yang terlalu rendah dan bertahan lama juga dapat merusak keberlanjutan usaha tani. Stabilitas yang sehat adalah keadaan ketika harga cukup terjangkau bagi konsumen, namun tetap memberikan insentif yang layak bagi produsen untuk menanam, memelihara, dan berinvestasi. Di sinilah persoalan pangan berbeda dari kebijakan inflasi umum. Bila kebijakan hanya mengejar harga rendah tanpa memikirkan produktivitas produsen, maka dalam jangka menengah suplai akan melemah dan harga justru berpotensi naik lebih tinggi. Sebaliknya, bila kebijakan hanya melindungi produsen tanpa pengaman bagi konsumen miskin, maka ketahanan sosial akan terganggu. Ekonomi pangan dengan demikian adalah seni menjaga keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

2. Mengapa Harga Pangan Sangat Sensitif secara Sosial

Harga pangan bersifat sensitif karena pangan mengisi porsi besar dalam struktur pengeluaran rumah tangga berpendapatan rendah. Data BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2025 persentase penduduk miskin Indonesia masih 8,47 persen atau 23,85 juta orang, dengan rata-rata garis kemiskinan nasional sebesar Rp609.160 per kapita per bulan. Untuk rumah tangga miskin rata-rata dengan 4,72 anggota, garis itu setara dengan

pengeluaran sekitar Rp2,88 juta per bulan. Pada tingkat ini, ruang fiskal rumah tangga sangat sempit; sedikit kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, cabai, atau gula dapat memaksa rumah tangga mengurangi kualitas konsumsi, menunda pembelian protein, atau memotong pengeluaran lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, inflasi pangan tidak hanya mengubah angka indeks, tetapi juga mengubah strategi bertahan hidup keluarga. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Lebih jauh, struktur kemiskinan menunjukkan dominasi kebutuhan makanan. Dalam berbagai publikasi BPS daerah pada 2025, komponen garis kemiskinan makanan menyumbang sekitar tiga perempat dari keseluruhan garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan kelompok rentan sangat ditentukan oleh harga pangan dasar. Artinya, ketika harga pangan naik lebih cepat daripada pendapatan, rumah tangga miskin pertama-tama tidak “mengurangi gaya hidup”, melainkan mengurangi konsumsi yang esensial. Dalam narasi sosial, ini bisa berarti seorang ibu di kota menukar telur dengan mi instan beberapa hari dalam seminggu, atau keluarga pekerja informal menurunkan kualitas lauk agar uang sekolah tetap terbayar. Inilah sebabnya stabilitas harga pangan berfungsi sebagai pelindung sosial yang nyata, bukan konsep abstrak. ([BPS Jawa Barat](#))

FAO menegaskan bahwa inflasi pangan memengaruhi ketahanan pangan melalui dua mekanisme sekaligus: *income effect* dan *substitution effect*. Pertama, ketika harga pangan naik, pendapatan riil rumah tangga turun sehingga jumlah pangan yang mampu dibeli menyusut. Kedua, rumah tangga cenderung beralih dari makanan yang lebih bergizi ke makanan yang lebih murah tetapi kurang sehat. Karena itu, inflasi pangan bukan hanya persoalan jumlah konsumsi, tetapi juga mutu diet. Ini sangat penting dalam konteks WHO yang menekankan bahwa diet sehat melindungi masyarakat dari semua bentuk malnutrisi dan penyakit tidak menular. Stabilitas harga pangan, dalam pengertian ini, juga berfungsi menjaga mutu modal manusia. ([FAOHome](#))

3. Inflasi Pangan dan Konteks Indonesia Terkini

Secara makro, Indonesia berhasil menjaga inflasi umum 2025 pada 2,92 persen secara tahunan, masih berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1$ persen yang ditetapkan pemerintah dan Bank Indonesia. Namun pencapaian ini perlu dibaca lebih teliti. Bank Indonesia menjelaskan bahwa kelompok *volatile food* tetap mencatat inflasi 6,21 persen secara tahunan pada akhir 2025, meskipun kondisi ini dinilai masih terkelola oleh sinergi pengendalian inflasi pusat-daerah dan program ketahanan pangan nasional. Ini menunjukkan bahwa di dalam angka inflasi umum yang tampak terkendali, pangan bergejolak tetap menjadi titik yang perlu perhatian khusus. Pangan memang sering menjadi sumber tekanan inflasi yang berbeda karakternya dibanding inflasi inti karena sangat dipengaruhi musim, panen, gangguan cuaca, distribusi, dan sentimen pasar. ([Bank Indonesia](#))

Pada beberapa bulan 2025, dinamika ini terlihat jelas. Bank Indonesia mencatat bahwa pada Juni 2025 inflasi *volatile food* secara bulanan didorong antara lain oleh beras, cabai rawit, dan bawang merah seiring menurunnya pasokan pada akhir musim panen serta gangguan distribusi di beberapa wilayah. Pada November 2025, kelompok *volatile food* relatif stabil, tetapi BI tetap mencatat adanya tekanan pada bawang merah akibat pasokan yang terbatas dan kenaikan harga bibit. Temuan ini menunjukkan bahwa stabilitas harga pangan di Indonesia sangat bergantung pada kecepatan respons terhadap gangguan pasokan, bukan hanya pada pengendalian permintaan agregat. Dalam bahasa sederhana, inflasi pangan di Indonesia kerap lebih bersifat "supply-driven" daripada "demand-driven". ([Bank Indonesia](#))

Pada awal 2026, tekanan inflasi umum meningkat. BPS mencatat inflasi tahunan Februari 2026 sebesar 4,76 persen dengan IHK 110,50, sementara Bank Indonesia menampilkan angka yang sama pada laman indikator inflasi. Sebagian kenaikan ini dipengaruhi *low base effect* dari kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025, tetapi tetap menunjukkan bahwa pengelolaan stabilitas harga memasuki fase yang lebih menantang. Di

tingkat kelompok pengeluaran, data BPS juga memperlihatkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi salah satu penyumbang utama inflasi secara bulanan pada Februari 2026. Hal ini mengonfirmasi bahwa sekalipun sumber tekanan inflasi total dapat beragam, pangan hampir selalu menjadi komponen yang menentukan persepsi masyarakat terhadap “mahal” atau “murahnya” hidup sehari-hari. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

4. Stabilitas Harga sebagai Tujuan Kebijakan Publik

Dalam teori ekonomi makro, stabilitas harga umumnya dipandang sebagai prasyarat bagi kepastian usaha, efisiensi alokasi, dan pertumbuhan. Tetapi dalam ekonomi pangan, stabilitas harga juga merupakan instrumen perlindungan sosial. Bank Indonesia menjelaskan bahwa karena inflasi Indonesia rentan terhadap *supply-side shocks*, pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah dan bank sentral melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral. Untuk itu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah. Penjelasan ini penting karena menempatkan pengendalian harga pangan sebagai tugas kolektif lintas lembaga, bukan sekadar persoalan suku bunga. Artinya, stabilitas pangan adalah hasil dari tata kelola kebijakan, logistik, dan produksi yang terintegrasi. ([Bank Indonesia](#))

Pada Januari 2026, pemerintah dan Bank Indonesia kembali menegaskan sasaran inflasi 2026 sebesar $2,5 \pm 1$ persen dan secara khusus menargetkan inflasi harga bergejolak pada kisaran 3,0–5,0 persen. Lima langkah strategis yang disepakati meliputi menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, memperlancar distribusi dan logistik pangan, menyusun kebijakan *administered prices* yang mempertimbangkan *timing* dan daya beli, memperkuat komunikasi kebijakan, serta memberikan dukungan untuk menjaga daya beli masyarakat termasuk melalui bantuan pangan pada periode Februari–Maret 2026. Ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang stabilitas harga pangan bukan semata target statistik, tetapi

bagian dari strategi menjaga konsumsi, logistik, dan ekspektasi masyarakat. ([Bank Indonesia](#))

Bila dibaca dari sudut ekonomi pangan, kebijakan stabilisasi yang efektif memerlukan empat lapis intervensi. Lapis pertama adalah produksi, yakni memastikan petani memperoleh benih, pupuk, pembiayaan, irigasi, dan teknologi yang memadai. Lapis kedua adalah distribusi, yakni memastikan komoditas dari daerah surplus dapat bergerak cepat ke daerah defisit. Lapis ketiga adalah cadangan dan intervensi pasar untuk meredam gejolak ekstrem. Lapis keempat adalah perlindungan pendapatan rumah tangga rentan ketika harga tetap naik. Tanpa keempat lapis ini, stabilitas harga hanya akan bersifat semu: tampak tenang sementara tetapi rapuh ketika diterpa cuaca buruk, gangguan distribusi, atau lonjakan musiman permintaan. ([Badan Pangan Nasional](#))

5. Kesejahteraan Petani dan Dilema Produsen-Konsumen

Di satu sisi, masyarakat membutuhkan harga pangan yang terjangkau. Di sisi lain, produsen pangan, terutama petani kecil, memerlukan harga yang memadai agar usaha mereka berkelanjutan. Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Desember 2025 mencapai 125,35, naik 1,05 persen dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik lebih cepat daripada indeks harga yang dibayar petani. Secara sepintas, angka ini memberi sinyal perbaikan daya tukar petani. Namun BPS juga mencatat kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga petani, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Artinya, kesejahteraan petani tetap tidak dapat dibaca hanya dari harga output, tetapi juga dari tekanan biaya hidup yang mereka hadapi sebagai konsumen. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dilema inilah yang membuat ekonomi pangan tidak bisa dikelola dengan logika tunggal "harga murah untuk semua". Bila harga eceran beras ditekan terlalu rendah untuk kepentingan konsumen, petani berisiko kehilangan insentif tanam. Sebaliknya, bila harga di tingkat produsen dinaikkan tanpa instrumen perlindungan konsumen, rumah tangga miskin akan

menanggung beban yang berat. Di sinilah stabilitas menjadi lebih penting daripada sekadar murah atau mahal. Harga yang stabil memungkinkan petani merencanakan musim tanam dan rumah tangga merencanakan konsumsi. Ketidakstabilanlah yang paling berbahaya, karena ia memperbesar ketidakpastian di kedua sisi sekaligus. Dari sudut ketahanan sosial, volatilitas harga sering lebih merusak daripada level harga yang sedikit lebih tinggi tetapi dapat diprediksi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam narasi sosial-ekonomi Indonesia, dilema ini terlihat jelas. Seorang petani padi di desa membutuhkan harga gabah yang wajar agar biaya tanam, sewa lahan, dan kebutuhan keluarga tertutup. Pada saat yang sama, seorang buruh informal di kota berharap harga beras tidak naik karena penghasilannya harian dan tidak pasti. Negara berada di tengah dua kepentingan yang sama-sama sah. Karena itu, kebijakan pangan yang matang tidak boleh mempertentangkan petani dan konsumen secara dangkal. Jalan keluarnya adalah peningkatan produktivitas, efisiensi logistik, pengurangan kehilangan pascapanen, penguatan cadangan, dan bantuan terarah bagi kelompok rentan. Dengan cara itu, pendapatan produsen dapat ditopang tanpa harus membiarkan konsumen miskin memikul seluruh biaya penyesuaian. ([Bank Indonesia](#))

6. Stabilitas Harga dan Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial dapat dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk bertahan, menyesuaikan diri, dan pulih ketika menghadapi tekanan ekonomi atau sosial. Dalam konteks pangan, ketahanan sosial bergantung pada apakah rumah tangga masih mampu memperoleh pangan cukup dan layak ketika harga naik, pasokan terganggu, atau pendapatan menurun. Oleh sebab itu, stabilitas harga pangan adalah salah satu elemen paling praktis dari ketahanan sosial. Ia memengaruhi bukan hanya tingkat konsumsi, tetapi juga stabilitas psikologis rumah tangga, kualitas relasi sosial, dan kepercayaan terhadap institusi publik. Ketika harga kebutuhan pokok mudah melonjak dan sulit diprediksi, rasa aman ekonomi masyarakat ikut menurun. ([FAOHome](#))

FAO menunjukkan bahwa tingginya inflasi pangan berkorelasi dengan peningkatan kerawanan pangan dan malnutrisi anak. Dampaknya paling berat dirasakan rumah tangga miskin, komunitas perdesaan yang rentan, dan kelompok perempuan. Temuan ini selaras dengan pengalaman banyak negara berkembang: guncangan harga pangan jarang berhenti pada pasar, tetapi menjalar ke status gizi, kehadiran anak di sekolah, kesehatan ibu, dan kualitas tenaga kerja di masa depan. Dari perspektif pembangunan, kestabilan pangan adalah investasi dalam produktivitas jangka panjang. Negara yang gagal menjaga keterjangkauan pangan pada akhirnya tidak hanya menghadapi masalah sosial saat ini, tetapi juga menurunkan kualitas modal manusia generasi berikutnya. ([FAOHome](#))

Di Indonesia, dimensi ketahanan sosial ini sangat penting karena struktur kemiskinan masih cukup besar dan disparitas wilayah tinggi. BPS menunjukkan bahwa pada Maret 2025 kemiskinan perdesaan sebesar 11,03 persen, jauh di atas perkotaan 6,73 persen. Artinya, rumah tangga perdesaan sebagai produsen pangan pun tidak otomatis bebas dari kerentanan. Dalam banyak kasus, mereka justru mengalami “double exposure”: ketika harga output rendah mereka rugi sebagai produsen, dan ketika harga kebutuhan hidup naik mereka juga terdampak sebagai konsumen. Dengan demikian, ketahanan sosial dalam ekonomi pangan tidak dapat dibangun dengan asumsi sederhana bahwa kenaikan harga otomatis menguntungkan desa dan merugikan kota. Realitasnya jauh lebih berlipis. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

7. Peran Perlindungan Sosial dalam Ekonomi Pangan

Karena harga pangan selalu berisiko bergejolak, perlindungan sosial menjadi komponen penting dalam ekonomi pangan modern. World Bank dalam *State of Social Protection Report 2025* menekankan bahwa sistem perlindungan sosial yang kuat memerlukan registri sosial yang dinamis, sistem pembayaran digital, dan interoperabilitas data agar dukungan dapat diberikan dengan cepat pada saat normal maupun saat krisis. Laporan itu juga menyebut bahwa program bantuan pangan Indonesia mendorong

penerima untuk membeli pangan bernutrisi lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa perlindungan sosial pangan yang baik tidak hanya menahan lapar, tetapi juga dapat membentuk kualitas konsumsi. Dalam perspektif pembangunan, ini penting karena bantuan sosial yang sensitif gizi memiliki manfaat yang lebih luas daripada sekadar menambal daya beli jangka pendek. ([World Bank](#))

Perlindungan sosial menjadi semakin relevan ketika inflasi pangan meningkat lebih cepat daripada inflasi umum. Dalam kondisi seperti itu, rumah tangga miskin cenderung jatuh lebih cepat ke dalam kerawanan karena sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makanan. Bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi terarah, atau kombinasi keduanya dapat berfungsi sebagai *shock absorber*. Namun efektivitasnya sangat tergantung pada desain. Bila data penerima tidak akurat, bantuan terlambat, atau nilai bantuannya tidak menyesuaikan dengan inflasi, maka fungsi perlindungannya melemah. Karena itu, ekonomi pangan dan perlindungan sosial tidak boleh dipisahkan sebagai dua domain kebijakan berbeda. Keduanya adalah dua sisi dari upaya menjaga ketahanan sosial. ([World Bank](#))

Dalam praktik Indonesia, Badan Pangan Nasional menempatkan bantuan pangan sebagai instrumen perlindungan sosial yang berjalan berdampingan dengan intervensi pasar. Pada 2025 realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng disebut telah diterima lebih dari 18 juta penerima manfaat, dan program ini dilanjutkan pada 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, stabilisasi pasokan dan harga pangan dilakukan melalui SPHP, Gerakan Pangan Murah, fasilitasi distribusi pangan, penguatan kios pangan, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. Kombinasi ini menunjukkan bahwa negara mencoba mengelola dua sisi sekaligus: menurunkan tekanan harga di pasar dan menopang daya beli kelompok rentan. Secara konseptual, pendekatan seperti ini lebih tepat daripada hanya mengandalkan satu instrumen tunggal. ([Badan Pangan Nasional](#))

8. Tata Kelola Stabilitas Harga Pangan di Indonesia

Stabilitas harga pangan tidak mungkin dijaga tanpa tata kelola kelembagaan yang jelas. Badan Pangan Nasional memiliki tugas melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan, termasuk pengadaan serta penyaluran cadangan pangan pemerintah. Tugas yang luas ini menunjukkan bahwa stabilitas harga tidak dianggap semata urusan perdagangan, tetapi berkaitan erat dengan kerawanan pangan, gizi, dan informasi pasar. Bahkan visi-misi lembaga tersebut secara eksplisit menempatkan penguatan ketersediaan dan cadangan pangan, stabilitas pasokan dan harga, pengentasan kerawanan pangan dan gizi, serta penguatan logistik pangan sebagai sasaran utama. ([Badan Pangan Nasional](#))

Pada level kebijakan yang lebih luas, Bappenas menegaskan bahwa transformasi sistem pangan merupakan salah satu prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029, dengan penekanan pada kemandirian pangan, inovasi teknologi pertanian, dan keberlanjutan. Arah ini penting karena stabilitas harga tidak dapat dijaga terus-menerus hanya dengan operasi pasar; ia harus dibangun dari peningkatan efisiensi sistem pangan secara keseluruhan. Jika produktivitas naik, logistik membaik, hilirisasi berkembang, dan data menjadi lebih presisi, maka kebutuhan intervensi darurat dapat dikurangi. Dengan kata lain, stabilitas harga yang berkelanjutan adalah hasil dari reformasi sistem, bukan hanya dari respons jangka pendek saat harga mulai naik. ([Bappenas](#))

Dari perspektif ekonomi publik, tata kelola harga pangan membutuhkan integrasi pusat-daerah yang kuat. Bank Indonesia menegaskan peran TPIP dan TPID dalam pengendalian inflasi serta pentingnya koordinasi antarlembaga karena inflasi Indonesia sangat rentan terhadap guncangan sisi penawaran. Bapanas, di sisi lain, memperkuat pemantauan harga melalui jaringan enumerator, perluasan komoditas yang dipantau, serta

fasilitasi distribusi antarwilayah dari daerah surplus ke daerah defisit. Ini menggambarkan bahwa stabilitas harga pangan pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas *state capacity*: kemampuan negara membaca data secara cepat, menggerakkan logistik, berkoordinasi lintas lembaga, dan berkomunikasi dengan pasar serta masyarakat. ([Bank Indonesia](#))

9. Agenda Strategis ke Depan

Ke depan, ekonomi pangan Indonesia memerlukan pergeseran dari pendekatan reaktif ke pendekatan preventif dan adaptif. Pertama, penguatan produksi domestik harus diarahkan bukan hanya pada volume, tetapi pada produktivitas yang tahan iklim dan efisien secara biaya. Kedua, sistem logistik harus diperbaiki agar selisih harga antarwilayah menyempit dan daerah defisit tidak terlalu rentan terhadap gangguan suplai. Ketiga, data pangan harus semakin interoperabel sehingga pengambilan keputusan tidak tertinggal dari dinamika pasar. Keempat, instrumen perlindungan sosial harus cukup fleksibel untuk merespons lonjakan harga secara cepat. Kelima, kebijakan gizi harus diintegrasikan ke dalam strategi pangan agar keterjangkauan yang dijaga bukan hanya kalori murah, tetapi juga diet yang lebih sehat. Agenda semacam ini sejalan dengan rekomendasi global bahwa pengendalian harga pangan harus dipadukan dengan perbaikan *food systems* dan penguatan *shock-responsive social protection*. ([World Bank](#))

Dalam kerangka yang lebih luas, stabilitas harga pangan perlu dipandang sebagai bagian dari kontrak sosial antara negara dan warga. Negara tidak wajib menjamin bahwa semua harga selalu rendah, tetapi negara wajib membangun sistem yang membuat rumah tangga tidak jatuh ke dalam krisis hanya karena harga pangan bergejolak. Itu berarti negara harus hadir bukan hanya ketika inflasi melonjak, melainkan jauh sebelumnya: saat benih didistribusikan, irigasi dibangun, data diperbarui, cadangan dikelola, distribusi diperlancar, dan bantuan sosial diperbaiki. Dalam makna inilah ekonomi pangan terhubung langsung dengan ketahanan sosial. Harga

yang stabil adalah salah satu bentuk paling konkret dari rasa aman ekonomi warga negara. ([Badan Pangan Nasional](#))

Penutup

Makalah ini menegaskan bahwa ekonomi pangan tidak dapat direduksi menjadi urusan produksi atau perdagangan belaka. Ia adalah arena tempat bertemunya daya beli rumah tangga, kesejahteraan petani, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, logistik, gizi, dan perlindungan sosial. Dalam konteks ini, stabilitas harga pangan memiliki kedudukan yang sangat strategis karena memengaruhi langsung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial. Data global FAO memperlihatkan bahwa inflasi pangan yang tinggi dapat memperburuk kerawanan pangan dan malnutrisi, sedangkan data Indonesia menunjukkan bahwa meskipun inflasi umum 2025 berhasil dijaga dalam sasaran, komponen pangan bergejolak tetap menuntut intervensi yang serius dan berkelanjutan. ([FAOHome](#))

Dalam konteks Indonesia, tantangan utamanya terletak pada bagaimana menjaga harga tetap terjangkau tanpa merusak insentif produsen, dan bagaimana melindungi rumah tangga rentan tanpa bergantung sepenuhnya pada intervensi ad hoc. Jawabannya bukan satu kebijakan tunggal, melainkan kombinasi antara peningkatan produktivitas, perbaikan distribusi, penguatan cadangan pangan, pengendalian ekspektasi inflasi, pemanfaatan data yang lebih presisi, serta perlindungan sosial yang adaptif. Dengan kata lain, stabilitas harga pangan harus dipahami sebagai hasil dari sistem ekonomi pangan yang sehat. Bila sistem itu kuat, ketahanan sosial masyarakat akan lebih kokoh. Bila sistem itu rapuh, gejolak harga kecil pun dapat menjalar menjadi kerentanan sosial yang luas. ([Badan Pangan Nasional](#))

Pada akhirnya, stabilitas harga pangan bukan sekadar target inflasi atau keberhasilan teknokratik. Ia adalah syarat agar keluarga dapat makan dengan layak, anak dapat tumbuh sehat, petani tetap mau menanam, dan masyarakat tetap percaya bahwa negara hadir di saat penting. Dalam perspektif pembangunan, itu berarti ekonomi pangan harus ditempatkan

di jantung kebijakan sosial-ekonomi nasional. Pangan yang stabil tidak hanya menenangkan pasar; ia juga menguatkan masyarakat. ([Peraturan BPK](#))

Glosarium

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Persediaan pangan yang dikelola negara untuk menjaga ketersediaan, menghadapi keadaan darurat, dan melakukan intervensi pasar.

Ekonomi pangan

Cabang kajian ekonomi yang membahas produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan kebijakan terkait pangan.

Food systems

Keseluruhan sistem yang menghubungkan produksi, pengolahan, distribusi, konsumsi, dan dampak sosial-ekologis pangan.

Inflasi pangan

Kenaikan harga pangan yang berlangsung terus-menerus dalam suatu periode tertentu.

Ketahanan pangan

Kondisi ketika pangan tersedia, aman, bergizi, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Ketahanan sosial

Kemampuan masyarakat bertahan, menyesuaikan diri, dan pulih dari tekanan ekonomi maupun sosial.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani, digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan relatif petani.

SPHP

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, yaitu program intervensi pemerintah untuk meredam gejolak harga komoditas pangan strategis.

Volatile food

Komponen inflasi yang terdiri dari bahan pangan bergejolak, sangat dipengaruhi panen, cuaca, distribusi, dan musim.

Garis kemiskinan makanan

Nilai minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan dasar yang setara kebutuhan energi minimum.

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pangan Nasional. (n.d.). *Tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional*.

Badan Pangan Nasional. (n.d.). *Visi dan misi Badan Pangan Nasional*.

Badan Pangan Nasional. (2026, January 12). *Ini strategi Bapanas di 2026 untuk menjaga stabilitas harga pangan*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024, December 5). *Bappenas dorong transformasi pangan nasional untuk ketahanan dan keberlanjutan pangan*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Komoditas strategis dan hilirisasi pertanian sebagai pilar ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025–2029*.

Badan Pusat Statistik. (2025, July 25). *Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*.

Badan Pusat Statistik. (2026, January 5). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Desember 2025 sebesar 2,92 persen*.

Badan Pusat Statistik. (2026, January 5). *Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 sebesar 125,35 atau naik 1,05 persen.*

Badan Pusat Statistik. (2026, March 2). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Februari 2026 sebesar 4,76 persen.*

Bank Indonesia. (n.d.). *Inflation.*

Bank Indonesia. (2025, June). *Inflation maintained in June 2025.*

Bank Indonesia. (2025, November). *Inflasi November 2025 tetap terjaga.*

Bank Indonesia. (2026, January 30). *Pemerintah dan Bank Indonesia perkuat sinergi menjaga inflasi 2026.*

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025: Addressing high food price inflation for food security and nutrition.*

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, July 28). *Hunger declines globally, but rises in Africa and western Asia: UN report.*

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *Making better policies for food systems.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

World Bank. (2025). *FoodSystems 2030 annual report fiscal year 2025.*

World Bank. (2025). *State of social protection report 2025.*

World Health Organization. (2026, January 26). *Healthy diet.*

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 29 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c88f3f-3aec-8398-aafa-8b1f21da7991>